TINDAK TUTUR PENYIDIK DALAM INTEROGASI KASUS KDRT (KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA) DI POLRESTA BANJARMASIN

SPEECH ACT INVESTIGATOR IN INTERROGATION CASE DOMESTIC VIOLENCE (DOMESTIC VIOLENCE) IN POLRESTA BANJARMASIN

Hestiyana

Balai Bahasa Kalimantan Selatan

Jalan Jenderal A.Yani Km 32,2 Loktabat Utara, Banjarbaru Kalimantan Selatan 70712

Pos-el: hestiyana21@gmail.com

Abstract

This study discusses the form of investigative speech acts in interrogation cases of domestic violence in Polresta Banjarmasin. This research focusing on the pragmatic domain aims to describe the form of investigative speech acts in interrogating cases of domestic violence in Polresta Banjarmasin. The method used is descriptive method with a qualitative approach because the data obtained in the form of text of the Minutes of Examination (BAP) sourced from the jurisdiction of Polresta Banjarmasin. The source of this research data is the BAP in the case of domestic violence in the jurisdiction of Polresta Banjarmasin in December 2016, while the data in this research is in the form of investigator's speech in interrogation in the case of domestic violence. The investigators' texts in the interrogation are contained in the victim witness BAP, suspect BAP, and witness BAP. Data were collected by using techniques, namely: (1) observation, (2) documentation study, and (3) interview. The result of the research shows that investigation act in interrogation in BAP case of KDRT in jurisdiction of Polresta Banjarmasin found three forms of speech acts used by investigator, that is: (1) speech act representative, (2) speech act directive, and (3) acts expressive. The categories of functions that emerged in this study were (1) speech act representative function states, reporting function, demanding function, function of giving testimony, recognizing function, and show function; (2) speech acts urgent function directive, suggesting function, and requesting function; and (3) expressive speech acts blame function. From the results it is known that the most widely used speech actors are assertive speech acts with six function categories, followed by the use of directive speech acts with three function categories, and the least found use of expressive speech acts with one function category. This research may serve as a reference for further research on pragmatic and linguistic forensic studies with the aim of developing applied linguistic science.

Keywords: *speech acts, interrogation, cases of domestic violence*

Abstrak

Penelitian ini membahas bentuk tindak tutur penyidik dalam interogasi kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Polresta Banjarmasin. Penelitian yang memfokuskan pada ranah pragmatik ini bertujuan mendeskripsikan bentuk tindak tutur penyidik dalam interogasi kasus KDRT di Polresta Banjarmasin. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif karena data yang diperoleh berupa teks Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang bersumber dari wilayah hukum Polresta Banjarmasin. Sumber data penelitian ini yaitu BAP pada kasus KDRT di wilayah hukum Polresta Banjarmasin bulan Desember tahun 2016, sedangkan data dalam penelitian ini berupa tuturan-

tuturan penyidik dalam interogasi pada kasus KDRT. Tuturan-tuturan penyidik dalam interogasi tersebut terdapat dalam BAP saksi korban, BAP tersangka, dan BAP saksi. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik, yaitu: (1) observasi, (2) studi dokumentasi, dan (3) wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak tutur penyidik dalam interogasi yang terdapat dalam BAP kasus KDRT di wilayah hukum Polresta Banjarmasin ditemukan tiga bentuk tindak tutur yang digunakan penyidik, yaitu: (1) tindak tutur representatif, (2) tindak tutur direktif, dan (3) tindak tutur ekspresif. Kategori fungsi yang muncul dalam penelitian ini ialah (1) tindak tutur representatif fungsi menyatakan, fungsi melaporkan, fungsi menuntut, fungsi memberikan kesaksian, fungsi mengakui, dan fungsi menunjukkan; (2) tindak tutur direktif fungsi mendesak, fungsi menyarankan, dan fungsi meminta; dan (3) tindak tutur ekspresif fungsi menyalahkan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa tindak tutur yang paling banyak digunakan penyidik adalah tindak tutur asertif dengan enam kategori fungsi, diikuti oleh penggunaan tindak tutur direktif dengan tiga kategori fungsi, dan yang paling sedikit ditemukan penggunaan bentuk tindak tutur ekspresif dengan satu kategori fungsi. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya pada kajian pragmatik dan linguistik forensik dengan tujuan pengembangan keilmuan linguistik terapan.

Kata Kunci: tindak tutur, interogasi, kasus KDRT

A. PENDAHULUAN

Bahasa sebagai alat komunikasi digunakan untuk menyampaikan maksud dan tujuan kepada orang lain. Tarigan (1990: 9) menyatakan komunikasi merupakan pertukaran ide-ide, gagasan, informasi antara dua orang atau lebih. Bahasa mempunyai peranan yang sangat penting dalam berinteraksi dan menyampaikan gagasan serta mengekspresikan ide-ide. Chomsky dan Wittgenstein (dalam Sumarsono, 2004: 160) menegaskan bahwa bahasa merupakan kesan bunyi dan kaidah-kaidah yang abstrak secara potensial tersimpan dalam benak.

Salah satu aspek dalam ilmu bahasa yang dapat digunakan untuk mengkaji tindak tutur adalah pragmatik. Pragmatik menggarap tuturan-tuturan yang lebih konkret dalam peristiwa berbahasa. Dalam pragmatik, penutur dan mitra tutur menyadari adanya kaidah-kaidah yang mengatur tuturan-tuturan dalam sebuah situasi dan konteks sosial. Dengan kata lain, pragmatik mempelajari hubungan antara tuturan dan konteks. Hal ini seperti yang dikatakan Yusri (2016: 1) bahwa pragmatik merupakan ilmu bahasa yang mempelajari relasi antara tanda, makna, dan konteks.

Djarmika (2016: 12) menyatakan bahwa pragmatik lebih berkenaan dengan tuturan yang digunakan oleh penutur dalam interaksi, apa sebenarnya maksud di balik ujaran yang dia eksekusi, bagaimana penutur dapat menangkap maksud atau tuturan yang disampaikan tidak eksplisit, bagaimana tuturan yang sama dapat mengakomodasi maksud yang berbeda manakala aspek konteks itu berubah, dan bagaimana setiap maksud dari sebuah tuturan itu bisa memiliki kekuatan yang membuat lawan bicara merespons dengan sebuah reaksi tertentu. Semua itu memerlukan sistem semiotika bentuk lain yang sifatnya kontekstual.

Tindak tutur sebagai salah satu bagian telaah pragmatik merupakan suatu gejala individual yang bersifat psikologis karena tergantung pada beberapa faktor, seperti kepada siapa berbicara, tempat tuturan berlangsung, mengenai masalah yang dibicarakan, dan situasi tuturan tersebut disampaikan. Dalam tindak tutur, penutur menuturkan kalimat-kalimat yang menarik karena berusaha menyesuaikan tuturan dengan konteks. Hal ini berarti tindak tutur ditentukan oleh kemampuan berbahasa penutur dalam menghadapi suatu situasi tertentu.

Dengan demikian, tindak tutur merupakan hal yang penting dalam kajian pragmatik karena mengujarkan sebuah tuturan tertentu dapat dipandang sebagai suatu tindakan, seperti menyuruh, memerintah, dan memengaruhi. Di dalam peristiwa berbahasa, penutur dan mitra tutur akan melihat kepada siapa berbicara, tempat pembicaraan, mengenai masalah yang dibicarakan, serta situasi dan kondisi saat tuturan tersebut berlangsung. Dengan kata lain, konteks sangat memengaruhi tuturan tersebut.

Hubungan linguistik forensik sangat berkaitan dengan pragmatik karena dapat dikaitkan dengan konteks. Dalam hal ini, linguistik forensik sangat diperlukan kajiannya dalam berbagai aspek yang berkaitan dengan bahasa dan hukum. Linguistik forensik adalah ilmu yang menghubungkan antara bahasa, kriminalitas, dan hukum. Bahasa terkait dengan hukum melalui tiga cara, yaitu: 1) bahasa sebagai alat komunikasi antara hukum dengan pihak yang berwenang dan tersangka/saksi; 2) bahasa hukum, seperti konstruksi bahasa KUHP sulit dicerna dan dipahami; 3) ahli linguistik forensik yang membentuk korpus, koleksi teks dari orang yang menelepon emergensi, orang yang mencatat, orang yang melakukan pemerasan, surat kaleng, telepon gelap, pernyataan pengakuan, berita acara pemeriksaan kepolisian, bukti bahasa lainnya (Correa, 2013: 2).

Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum. Tentunya, asas-asas hukum tersebut terkait dengan norma. Hal ini seperti yang dikatakan Warjiyati (dalam Zahrotunnisa, 2016: 537) bahwa bahasa hukum memiliki kandungan norma di dalamnya, yaitu norma yang disusun dalam bentuk pernyataan yang bersifat faktual, norma yang disusun di balik perumusan hukuman, norma yang dimuat dalam pasal yang bersangkutan dan ada norma yang mengacu pada pasal lain, norma yang bersifat prosedural, dan norma mengenai perluasan pe-

ngertian terhadap subjek hukum. Soeparmono (2016:3) menegaskan bahwa hukum yang baik tidak semata-mata bergantung kepada asas-asas, sistematika rumusan pasal-pasal dan sanksi-sanksinya, tetapi kebaikan dan kesempurnaannya terletak pada faktor tata pelaksanaan dan manusia pelaksananya.

Kajian pragmatik menelaah pemakaian bahasa dan menghubungkan tuturan-tuturan dengan konteks secara tepat. Misalnya, kasus hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang sekarang ini marak terjadi. Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang serius dan bersifat relatif tertutup (pribadi) dan terjaga privasinya karena menyangkut persoalan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Dalam perspektif hukum, kasus KDRT tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Kehadiran undang-undang tersebut tujuannya tentu saja agar kasus-kasus KDRT tidak lagi terjadi dalam rumah tangga. Namun, kenyataan yang ada dalam masyarakat meskipun sudah terbit undang-undang tersebut, kasus KDRT tetap marak terjadi dalam masyarakat.

Hal ini disebabkan oleh kasus KDRT masih dianggap masalah pribadi yang biasanya diselesaikan secara kekeluargaan. Meskipun kasusnya ditempuh dengan cara kekeluargaan, tetapi tidak menjamin kasus KDRT tersebut tidak terulang lagi. Dalam perspektif linguistik forensik, tuturan-tuturan penyidik dalam interogasi ketika mengungkapkan kasus KDRT jelas merupakan fokus kajian yang menarik untuk diteliti. Kajian pragmatik dalam tataran linguistik ini sangat layak untuk dilakukan, mengingat dalam perkembangannya penelitian bidang linguistik dan hukum saling melengkapi.

Tindak tutur penyidik dalam interogasi merupakan kajian penting dalam perkembangan

kebahasaan, terutama linguistik terapan. Apabila terjadi sebuah ujaran tertentu maka dapat dipandang sebagai sebuah tindakan, seperti menyuruh ataupun meminta. Tuturan-tuturan penyidik pada saat proses interogasi, tentunya memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri. Hal ini disebabkan tuturan-tuturan penyidik tidak hanya berupa tuturan biasa, melainkan tuturan-tuturan yang bertujuan untuk mengungkap sebuah kasus kejahatan. Oleh karena itu, tindak tutur penyidik dalam interogasi kasus KDRT sangat menarik untuk diteliti.

Penelitian terdahulu yang terkait dengan bahasa dan hukum, terutama fokus kajian tindak tutur, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Hestiyana (2008) yang berjudul *Tindak Tutur dalam Proses Penyidikan Pidana di Polsekta Banjarmasin Utara (Kajian Pragmatik)*. Penelitian ini membahas bentuk tindak tutur dalam proses penyidikan pidana di Polsekta Banjarmasin Utara yang mencakup deiksis, konteks, praanggapan, presuposisi, dan parameter pragmatik. Selain itu, prinsip kerja sama dalam proses penyidikan pidana juga dibahas, yaitu terjadinya prinsip kerja sama antara introgator (penyidik) dengan lawan tutur. Selanjutnya, dibahas juga mengenai maksim yang digunakan, yaitu mencakup maksim yang digunakan tersangka, saksi korban, dan saksi bergantung dari sifat pertanyaan penyidik.

Arifianti (2016) melakukan penelitian yang berjudul *Tindak Tutur Penyidik dalam Interogasi pada Kasus Delik Aduan di Polda Jateng*. Penelitian ini menelaah bentuk tindak tutur penyidik yang terdapat pada BAP kasus delik aduan di Polda Jateng. Hasil penelitian ini memaparkan bidang pragmatik pada kajian tindak tutur dengan temuan jenis tindak tutur, yaitu: Pertama, representatif, yaitu jenis tindak tutur yang mengikat penuturnya dengan kebenaran yang disampaikan. Temuan penelitian ini berupa tindak tutur representatif fungsi menyatakan, fungsi melaporkan, fungsi menuntut, dan fungsi mengakui. Kedua, tindak

tutur direktif, yaitu tindak tutur yang mengikat penuturnya agar mitra tutur melaksanakan apa yang diintruksikan. Kategori fungsi yang muncul dalam penelitian ini adalah tindak tutur direktif fungsi mendesak dan tindak tutur fungsi menyaran.

Penelitian yang terkait dengan tindak tutur juga dilakukan Zahrotunnisa (2016) dengan judul *Tindak Tutur dalam Sidang Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak tutur dalam sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak tutur dalam sidang perkara pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur didominasi oleh hakim. Tindak tutur dari tuturan hakim bertujuan untuk mencari dan menggali fakta dari terdakwa yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan hukuman.

Sejauh ini, penelitian tindak tutur penyidik dalam interogasi pada kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Banjarmasin belum ditemukan. Padahal, kajian ini perlu dilakukan mengingat pentingnya peran bahasa dalam mengungkap suatu kasus kejahatan, baik secara fisik maupun psikis, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga. Hal yang menarik dari fokus kajian ini bahwa kasus hukum ditelaah dengan pisau bedah linguistik forensik, yakni mengombinasikan penelitian bidang hukum dan bahasa. Tentunya, data dari tuturan-tuturan penyidik dalam interogasi menjadi kajian yang menarik untuk dianalisis lebih lanjut.

Berdasarkan uraian terdahulu, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah tindak tutur penyidik dalam interogasi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Banjarmasin? Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan tindak tutur penyidik dalam interogasi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Banjarmasin.

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pragmatik, terutama kajian tindak tutur yang berhubungan dengan kasus hukum. Temuan penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi yang positif dan menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya pada bidang pragmatik serta ditindaklanjuti pada bidang linguistik forensik.

B. LANDASAN TEORI

Tindak tutur (*speech act*) merupakan salah satu unsur pragmatik yang melibatkan penutur dan mitra tutur. Hal ini seperti yang dikatakan Van Dijk (dalam Djajasudarma, 2012: 60) bahwa hubungan pragmatik dengan tindak tutur (*speech act*) sangat erat karena tindak tutur merupakan pusat dari pragmatik. Yule (1996: 3) menegaskan bahwa pragmatic adalah studi tentang makna yang disampaikan oleh penutur (penulis) dan ditafsirkan oleh pendengar (pembaca). Dengan kata lain, pragmatik adalah studi tentang maksud penutur.

Menurut Searle (dalam Rani, dkk. 2000: 136), dalam komunikasi bahasa terdapat tindak tutur. Ia berpendapat bahwa komunikasi bahasa bukan sekadar lambang, kata, atau kalimat yang berwujud perilaku tindak tutur. Sebagaimana komunikasi bahasa yang dapat berwujud pernyataan, pertanyaan, dan perintah, tindak tutur dapat pula berwujud pernyataan, pertanyaan, dan perintah.

Richards (Suyono, 1990: 5) berpendapat mengenai tindak tutur sebagai "*the things we actually do when we speak*" (sesuatu yang benar-benar kita lakukan ketika bertutur) atau "*the minimal unit of speaking which can be said to have function*" (satuan terkecil dari unit tuturan yang dapat dikatakan memiliki fungsi).

Leech (Wijana, 1996: 115) lebih mengkhusiskan tindak tutur atau *speech act* merupakan suatu tindakan yang diungkapkan melalui bahasa yang disertai gerak dan sikap anggota badan untuk

mendukung maksud pembicara. Tindak tutur ditentukan oleh adanya beberapa aspek situasi ujar, antara lain: (1) yang menyapa (penutur) dan yang disapa (petutur); (2) latar belakang; (3) tujuan sebuah tuturan; (4) bentuk tindak kegiatan; dan (5) produk tindak verbal.

Rustono (1999: 32) mengemukakan tindak tutur atau tindak ujar (*speech act*) adalah aktivitas mengujarkan atau menuturkan tuturan dengan maksud tertentu. Chaer (2010: 27) menyatakan tindak tutur adalah tuturan dari seseorang yang bersifat psikologis dan yang dilihat dari makna tindakan dalam tuturannya itu. Serangkaian tindak tutur akan membentuk suatu peristiwa tutur (*speech event*). Lalu, tindak tutur dan peristiwa tutur ini menjadi dua gejala yang terdapat pada satu proses, yakni proses komunikasi.

Dengan demikian, tindak tutur merupakan suatu bentuk tuturan yang tidak berupa tuturan-tuturan kalimat saja, tetapi penutur berusaha melakukan tindakan dengan kata-kata atau kalimat yang telah dituturkannya. Dengan kata lain, sebuah tuturan yang dituturkan oleh seseorang memiliki maksud dan tujuan tertentu. Tuturan tersebut bersifat psikologis dan ditentukan kemampuan berbahasa si penutur.

Kreidler (1998: 183) mengelompokkan tindak tutur menjadi tujuh macam bentuk tuturan, antara lain: pertama, asertif (*assertive utterances*) merupakan tindak tutur yang menyatakan pemakai bahasa mengetahui atau mempercayai sesuatu dengan tujuan memberikan informasi. Tindak tutur ini berkaitan dengan pengetahuan, data, apa yang ada atau diadakan, atau telah terjadi atau tidak terjadi. Kedua, performatif (*performative utterances*) merupakan tindak tutur yang menyebabkan resmi atau tidak. Tuturan performatif menjadi sah jika dinyatakan oleh seseorang yang berwenang dan dapat diterima. Verba performatif antara lain, bertaruh, mendeklarasikan, menominasikan,

menjatuhkan hukuman, menyatakan, dan mengumumkan.

Kemudian, ketiga, verdiktif (*verdictive utterances*) merupakan tindak tutur ketika penutur membuat penilaian atas tindakan orang lain, yakni mitra tutur. Penilaian-penilaian ini termasuk meranking, menilai, memuji, memaafkan. Verba verdiktif, yaitu: menuduh, bertanggung jawab, dan berterima kasih. Keempat, ekspresif (*expressive utterances*) merupakan tindak tutur yang bermula dari kegiatan sebelumnya atau akibat yang ditimbulkan atau kegagalan penutur. Verba yang termasuk tindak tutur ekspresif ini, yaitu mengakui, bersimpati, dan memaafkan.

Selanjutnya, kelima, direktif (*directive utterances*) merupakan tindak tutur yang menyatakan penutur berusaha meminta mitra tutur untuk melakukan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan. Ada tiga macam yang termasuk tindak tutur direktif ini, yaitu perintah, permohonan, dan anjuran. Keenam, komisif (*commissive utterances*) merupakan tindak tutur yang menyebabkan penutur melakukan serangkaian kegiatan. Yang termasuk tindak tutur komisif ini yaitu bersumpah, menawarkan, menyetujui, bertanya, dan sebagainya. Ketujuh, fatif (*phatic utterances*) merupakan tindak tutur yang bertujuan untuk menciptakan hubungan antara penutur dan mitra tutur. Tuturan-tuturan fatif ini termasuk ucapan salam.

Searle dalam Gunarwan (2004: 9) membagi tindak tutur menjadi lima jenis, yaitu: (1) *representatif*, ialah tindak ujar yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas hal yang dikatakannya, misalnya: menyatakan, melaporkan, menunjukkan, dan menyebutkan; (2) *direktif*, ialah tindak tutur yang dilakukan oleh penuturnya dengan maksud agar lawan tutur melakukan tindakan yang disebutkan dalam ujaran itu, misalnya menyuruh, memohon, menuntut, menyarankan, dan menantang; (3) *ekspresif*, ialah tindak tutur yang dilakukan dengan maksud agar ujarannya diartikan sebagai

evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam ujaran itu, misalnya: memuji, mengucapkan terima kasih, mengkritik, dan mengeluh; (4) *komisif*, ialah tindak tutur yang mengikat penuturnya untuk melaksanakan segala hal yang disebutkan dalam ujarannya, misalnya: berjanji, bersumpah, atau mengancam; dan (5) *deklarasi*, ialah tindak tutur yang dilakukan si penutur dengan maksud untuk menciptakan hal (status, keadaan, dan sebagainya) yang baru, misalnya: memutuskan, membatalkan, melarang, mengizinkan, dan memberikan maaf.

Dalam menganalisis tindak tutur penyidik dalam interogasi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Banjarmasin digunakan teori yang dikemukakan Searle dalam Gunarwan (2004), yaitu: (1) tindak tutur representatif, (2) tindak tutur direktif, (3) tindak tutur ekspresif, (4) tindak tutur komisif, dan (5) tindak tutur deklarasi.

Pengertian tentang penyidik dikemukakan Waluyo (2004: 44), yaitu orang yang melakukan penyidikan. Ketentuan Umum dalam Pasal 1 KUHAP, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan (Soeparmono, 2016: 6). Jadi, penyidik bertugas melakukan penyidikan atas suatu kasus kejahatan.

C. METODE PENELITIAN

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena sumber data yang diperoleh berupa teks Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus KDRT di wilayah hukum Polresta Banjarmasin bulan Desember tahun 2016. Data dalam penelitian ini berupa tuturan-tuturan penyidik dalam interogasi pada kasus KDRT. Tuturan-tuturan penyidik dalam interogasi tersebut terdapat dalam BAP saksi korban, BAP tersangka, dan BAP saksi. Data dikumpulkan

dengan menggunakan teknik, yaitu: (1) observasi, (2) studi dokumentasi, dan (3) wawancara. Observasi dilakukan dengan mengamati sumber data, yakni Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kasus KDRT. Studi dokumentasi dilakukan dengan melihat hasil-hasil penelitian yang terkait dengan fokus masalah dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan kepada penyidik yang menangani kasus KDRT tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dalam proses pengumpulan data dan penganalisisan data. Silalahi (2006: 70) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu strategi penelitian yang menekankan penyajian data pada kata-kata daripada angka kuantitatif.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bulan Desember tahun 2016 yang dibuat oleh penyidik kepolisian di wilayah hukum Polresta Banjarmasin. Dari kasus KDRT yang dilaporkan pada bulan Desember, hanya diambil satu kasus KDRT sebagai sampel data karena sudah mewakili penggunaan tindak tutur penyidik dalam interogasi.

D. PEMBAHASAN

Dalam menganalisis tindak tutur penyidik dalam interogasi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Banjarmasin digunakan analisis yang dikemukakan Searle dalam Gunarwan (2004). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak tutur penyidik dalam interogasi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Banjarmasin berupa tindak tutur representatif, tindak tutur direktif, dan tindak tutur ekspresif. Secara tidak langsung, hasil penelitian ini juga mengungkapkan fungsi tindak tutur tersebut yang dipergunakan penyidik untuk membantu proses penyidikan dan pemecahan kasus KDRT. Berikut hasil analisisnya.

1. Tindak Tutur Representatif

Tindak tutur representatif adalah tindak tutur yang mengikat penuturnya kepada kebenaran atas hal yang dikatakannya, misalnya menyatakan, melaporkan, memprediksi, menunjukkan, dan menyebutkan. Hasil identifikasi tindak tutur penyidik dalam interogasi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Banjarmasin ditemukan tindak tutur representatif fungsi menyatakan, fungsi melaporkan, fungsi menuntut, fungsi memberikan kesaksian, fungsi mengakui, dan fungsi menunjukkan. Berikut hasil analisisnya.

1. Fungsi Menyatakan

- (1) Penyidik: "Keterangan yang diberikan apakah yang sebenarnya ... an apakah ada paksaan oleh pihak pemeriksa?"

Tersangka: "Keterangan yang saya berikan adalah yang sebenarnya ... dan tidak ada dipaksa oleh pihak pemeriksa dan" (*BAP Tersangka, Pertanyaan 17*).

Tuturan penyidik pada data (1) di atas merupakan tindak tutur representatif fungsi menyatakan. Penggalan interogasi penyidik "Keterangan yang diberikan apakah yang sebenarnya..." memiliki fungsi menyatakan bahwa segala keterangan yang akan diberikan tersangka terkait kasus KDRT yang membelitnya adalah keterangan yang sebenar-benarnya.

Begitu juga dengan penggalan interogasi penyidik "Dan apakah ada paksaan oleh pihak pemeriksa?..." dimaksudkan tersangka dalam memberikan keterangan yang akan ditanyakan oleh penyidik merasa ada paksaan atau tidak. Tindak tutur fungsi menyatakan ini mampu membantu penyidik dalam mengungkap perkara KDRT. Dengan demikian, tuturan pada BAP berisi pernyataan yang dituturkan oleh tersangka untuk menyatakan suatu kebenaran dalam memberikan keterangan yang ditanyakan penyidik.

2. Fungsi Melaporkan

- (2) Penyidik: "Berdasarkan laporan pengaduan Saudara LP ...tentang telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga/penganiayaan yang telah menimpa diri Saudara, kapan dan di mana kejadian...."

Saksi Korban: "Kejadian penganiayaan/kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi...." (*BAP Saksi Korban, Pertanyaan 2*).

Tuturan penyidik pada data (2) di atas merupakan tindak tutur representatif fungsi melaporkan. Tuturan penyidik kepada saksi korban "Berdasarkan laporan pengaduan Saudara LP...tentang telah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga/penganiayaan yang telah menimpa diri Saudara, kapan dan di mana kejadian ... " sebagai tindak lanjut laporan saksi korban atas kasus KDRT yang menyimpannya.

Laporan saksi korban kepada pihak kepolisian karena adanya perasaan tertekan dan terluka, baik fisik maupun psikologis karena perbuatan suaminya yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tuturan penyidik tersebut meminta saksi korban memberikan keterangan kapan dan di mana terjadinya penganiayaan yang menimpa pelapor. Dengan tindak tutur representatif fungsi melaporkan yang dituturkan saksi korban mampu membantu penyidik dalam mengungkap perkara KDRT tersebut.

3. Fungsi Menuntut

- (3) Penyidik: "Dengan cara bagaimana Saudara melakukan penganiayaan terhadap korban... dan apakah ada menggunakan alat?... " (*BAP Tersangka, Pertanyaan 8*).

Pada data (3) di atas, tuturan penyidik tersebut termasuk tindak tutur representatif fungsi menuntut. Interogasi penyidik kepada tersangka sebagai bentuk tuntutan atas perbuatan tersangka kepada saksi korban, dalam hal ini istrinya sendiri. Penyidik meminta dengan sejelas-jelasnya kepada

tersangka untuk memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai kronologis penganiayaan yang dilakukannya kepada korban. Penyidik juga menanyakan kepada tersangka alat apa yang digunakan ketika melakukan penganiayaan kepada istrinya.

- (4) Penyidik: "Apa permasalahannya sehingga Saudara melakukan...." (*BAP Tersangka, Pertanyaan 10*).

Pada data (4) di atas, tuturan penyidik "Apa permasalahannya sehingga Saudara melakukan..." juga termasuk tindak tutur representatif fungsi menuntut. Penyidik meminta tersangka untuk memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai permasalahan yang membuat tersangka melakukan penganiayaan terhadap istrinya sendiri. Dengan mengetahui permasalahan yang terjadi, penyidik dapat mengurai dan menindaklanjuti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan istri tersangka.

4. Fungsi Memberikan Kesaksian

- (5) Penyidik: "Siapa saja saksi yang melihat pada saat SR melakukan...." (*BAP Saksi Korban, Pertanyaan 13*).

Tuturan pada data (5) di atas merupakan tindak tutur representatif fungsi memberikan kesaksian. Tuturan penyidik kepada saksi korban sebagai pelapor berusaha mengungkap perkara KDRT dengan menanyakan "Siapa saja saksi yang melihat pada saat SR melakukan...." Dengan adanya kesaksian orang lain atas kasus yang menimpa pelapor akan menguatkan penyidik dalam menangani perkara KDRT yang menyimpannya.

- (6) Penyidik: "Apakah ada saksi yang Saudara tunjuk untuk meringanka..." (*BAP Tersangka, Pertanyaan 15*).

Penyidik pada data (6) di atas juga menanyakan kepada tersangka mengenai saksi yang dapat

membantu meringankannya dalam kasus yang sedang dihadapinya. Tuturan penyidik kepada tersangka "Apakah ada saksi yang Saudara tunjuk untuk meringankan..." termasuk tindak tutur representatif fungsi memberikan kesaksian. Dengan ditunjuknya saksi dari pihak tersangka dapat meringankan hukuman yang akan diterimanya.

- (7) Penyidik: "Apakah Saudara mengetahui siapa pelaku yang telah...." (*BAP Saksi, Pertanyaan 4*).

Selain meminta memberikan kesaksian kepada saksi korban dan tersangka, penyidik juga meminta saksi lain untuk memberikan kesaksian atas perkara KDRT yang sedang ditanganinya. Pada data (7) tuturan penyidik "Apakah Saudara mengetahui siapa pelaku yang telah..." merupakan tindak tutur representatif fungsi memberikan kesaksian. Tujuan tuturan penyidik dalam BAP untuk mengungkap perkara yang sedang ditangani.

5. Fungsi Mengakui

- (8) Penyidik: "Kapan dan di mana kejadian yang Saudara...."

Tersangka: "Kejadian penganiayaan/kekerasan dalam rumah tangga tersebut terjadi...." (*BAP Tersangka, Pertanyaan 5*).

Pada data (8) di atas, interogasi penyidik kepada tersangka dengan tuturan "Kapan dan di mana kejadian yang Saudara..." termasuk tindak tutur representatif fungsi mengakui. Penyidik meminta penjelasan kepada tersangka bahwa kapan terjadinya penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga serta tempat kejadian perkara. Pertanyaan penyidik pun dijawab dengan keterangan yang agak berbelit-belit oleh tersangka. Akan tetapi, penyidik terus mengorek informasi kepada tersangka. Dengan dituturkannya tindak tutur representatif fungsi mengakui maka dapat mengungkap perkara KDRT tersebut.

- (9) Penyidik: "Apakah sebelumnya Saudara memang sering melakukan penganiayaan terhadap korban...."

Tersangka: "Sebelumnya saya memang ada 3 (tiga)..." (*BAP Tersangka, Pertanyaan 11*).

Tuturan pertanyaan penyidik kepada tersangka "Apakah sebelumnya Saudara memang sering melakukan penganiayaan terhadap korban..." pada data (9) di atas, termasuk tindak tutur representatif fungsi mengakui. Penyidik meninjak-lanjudi atas laporan saksi korban dalam perkara KDRT yang menyimpannya. Penyidik ingin mengetahui apakah tersangka baru pertama kali atau sudah sering melakukan penganiayaan terhadap istrinya.

Pada saat interogasi tersebut, tersangka mengakui perbuatannya yang dinyatakan dengan tuturan "Sebelumnya saya memang ada 3 (tiga)..." Dari hasil dinterogasi penyidik diketahui bahwa tersangka sudah tiga kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, tuturan pertanyaan penyidik termasuk tindak tutur representatif fungsi mengakui yang mengharuskan tersangka mengakui atas perbuatannya.

6. Fungsi Menunjukkan

- (10) Penyidik: "Diperlihatkan kepada Saudari barang bukti yang didapat berupa... apakah Saudara dapat menerangkannya...." (*BAP Saksi Korban, Pertanyaan 15*).

Pada data (10) di atas, menunjukkan bahwa tuturan penyidik kepada saksi korban, yaitu "Diperlihatkan kepada Saudari barang bukti yang didapat berupa... apakah Saudara dapat menerangkannya..." termasuk tindak tutur representatif fungsi menunjukkan. Penyidik memperlihatkan barang bukti kepada pelapor atau saksi korban. Kemudian, penyidik meminta keterangan dari saksi korban untuk menerangkan barang bukti tersebut. Dengan dituturkannya tindak tutur representatif fungsi menunjukkan ini dapat

membantu penyidik dalam mengungkap perkara KDRT yang menimpa pelapor.

- (11) Penyidik: "Diperlihatkan kepada Saudara barang bukti berupa... apakah Saudara dapat menerangkannya..." (*BAP Tersangka, Pertanyaan 14*).

Tuturan penyidik "Diperlihatkan kepada Saudara barang bukti yang didapat berupa... apakah Saudara dapat menerangkannya..." merupakan tindak tutur representatif fungsi menunjukkan yang dituturkan kepada tersangka. Jadi, penyidik tidak hanya menunjukkan barang bukti kepada saksi korban, tetapi tersangka juga ditunjukkan barang bukti. Dengan tindak tutur representatif fungsi menunjukkan yang dituturkan penyidik, diharapkan tersangka agar memberikan keterangan yang sebenar-benarnya supaya proses penyidikan berjalan lancar.

- (12) Penyidik: "Diperlihatkan kepada Saudara seseorang yang bernama Saudara SR..., apakah Saudara dapat menerangkannya...." (*BAP Saksi, Pertanyaan 4*).

Selain kepada saksi korban dan tersangka, penyidik juga menggunakan tindak tutur representatif fungsi menunjukkan kepada saksi untuk menguatkan bukti penganiayaan yang dilakukan tersangka kepada pelapor atau saksi korban. Penyidik memperlihatkan tersangka kepada saksi dan meminta keterangan saksi yang sebenar-benarnya. Hal ini terlihat pada data (12) yang dituturkan penyidik kepada saksi, yaitu "Diperlihatkan kepada Saudara seseorang yang bernama Saudara SR..., apakah Saudara dapat menerangkannya...."

B. Tindak Tutur Direktif

Tindak tutur direktif merupakan tindak tutur yang dilakukan oleh penuturnya dengan maksud agar lawan tutur melakukan tindakan yang di-

sebutkan dalam ujaran itu, misalnya menyuruh, memohon, menyarankan, meminta, dan menantang. Hasil identifikasi tindak tutur penyidik dalam interogasi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Banjarmasin ditemukan tindak tutur direktif fungsi mendesak, fungsi menyarankan, dan fungsi meminta. Berikut hasil analisisnya.

1. Fungsi Mendesak

- (13) Penyidik: "Berapa kali Saudara melakukan penganiayaan tersebut dan..." (*BAP Tersangka, Pertanyaan 9*).

Tuturan penyidik kepada tersangka pada data (13) di atas "Berapa kali Saudara melakukan penganiayaan tersebut dan..." termasuk tindak tutur direktif fungsi mendesak. Interogasi penyidik kepada tersangka tersebut untuk mendesak tersangka agar mengatakan yang sebenar-benarnya mengenai kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukannya. Penyidik mendesak tersangka agar memberikan keterangan yang ditanyakan oleh penyidik. Dengan tindak tutur direktif fungsi mendesak ini, perkara KDRT dapat diproses lebih lanjut.

2. Fungsi Menyarankan

- (14) Penyidik: "Saudara sekarang ini diperiksa dan diambil keterangannya selaku tersangka dalam perkara KDRT... dan untuk pemeriksaan..., apakah Saudara perlu dihadirkan atau didampingi oleh pengacara/penasihat hukum?...." (*BAP Tersangka, Pertanyaan 2*).

Data (14) di atas yang dituturkan penyidik kepada tersangka termasuk tindak tutur direktif fungsi menyarankan. Penyidik memberitahukan bahwa pada saat itu pelaku menjadi tersangka dalam perkara KDRT dan harus menjalani pemeriksaan untuk diproses lebih lanjut. Penyidik bertanya dan memberikan saran kepada tersangka apakah perlu dihadirkan atau didampingi oleh pengacara/penasihat hukum. Dengan tindak tutur

direktif fungsi menyarankan ini, penyidik ingin membantu tersangka dalam kasus yang sedang dihadapinya.

3. Fungsi Meminta

(15) Penyidik: "Dapatkan Saudari ceritakan riwayat perkawinan...." (*BAP Saksi Korban, Pertanyaan 5*).

Data (15) di atas yang dituturkan penyidik kepada saksi, yaitu "dapatkan Saudari ceritakan riwayat perkawinan...." termasuk tindak tutur direktif fungsi meminta. Penyidik meminta keterangan dari pelapor atau saksi korban mengenai perkawinannya dengan pelaku atau tersangka dalam perkara KDRT. Dengan dimintanya keterangan dari pelapor atau saksi korban tersebut dapat memudahkan proses penyidikan terhadap perkara KDRT yang dilaporkannya kepada kepolisian.

C. Tindak Tutur Ekspresif

Tindak tutur ekspresif merupakan tindak tutur yang dilakukan dengan maksud agar ujarannya diartikan sebagai evaluasi tentang hal yang disebutkan dalam ujaran itu, seperti memuji, mengucapkan terima kasih, mengkritik, menyalahkan, ataupun mengeluh. Hasil identifikasi tindak tutur penyidik dalam interogasi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Banjarmasin ditemukan tindak tutur ekspresif fungsi menyalahkan. Berikut hasil analisisnya.

1. Fungsi Menyalahkan

(16) Penyidik: "Apakah Saudara telah mengerti dilakukan pemeriksaan...." (*BAP Tersangka, Pertanyaan 4*).

Data (16) yang dituturkan penyidik kepada tersangka termasuk tindak tutur ekspresif fungsi menyalahkan. Hal ini jelas terlihat dari hasil interogasi "Apakah Saudara telah mengerti dilakukan pemeriksaan...." Penyidik dalam melakukan

penyidikan tentunya berdasarkan laporan yang masuk, yakni istri tersangka sendiri sebagai pihak pelapor. Istri tersangka yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga sudah tidak bisa lagi bersabar dan menahan sakit secara fisik maupun psikologis. Masalah rumah tangga yang sudah dibina selama kurang lebih sembilan tahun tidak bisa dipertahankan lagi oleh saksi korban. Dengan tindak tutur ekspresif fungsi menyalahkan ini, penyidik secara tidak langsung sudah memberitahukan bahwa pelaku kekerasan dalam rumah tangga saat ini menjadi tersangka atas perbuatan penganiayaan yang dilakukannya.

(17) Penyidik: "Akibat penganiayaan yang Saudara lakukan terhadap...." (*BAP Tersangka, Pertanyaan 13*).

Tuturan penyidik pada data (17) di atas juga termasuk tindak tutur ekspresif fungsi menyalahkan. Interogasi penyidik dalam kalimat yang ditujukan kepada tersangka, yaitu "Akibat penganiayaan yang Saudara lakukan terhadap..." merupakan bentuk menyalahkan tersangka atas perbuatan yang telah dilakukannya. Istri tersangka mengalami kekerasan rumah tangga berupa kekerasan fisik dan psikologis. Penganiayaan yang dilakukan tersangka kepada istrinya mengakibatkan istrinya mengalami luka-luka di badan serta luka bakar di bagian wajah. Dengan tindak tutur ekspresif fungsi menyalahkan ini, penyidik ingin tersangka mau bekerja sama dengan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya sehingga proses penyidikan dapat berjalan lancar.

Dengan demikian, dari tindak tutur yang dikemukakan Searle dalam Gunarwan (2004) yang mencakup tindak tutur representatif, tindak tutur direktif, tindak tutur ekspresif, tindak tutur komisif, dan tindak tutur deklarasi hanya terdapat tiga penggunaan tindak tutur yang ditemukan dalam penelitian ini. Penggunaan jenis tindak tutur tersebut, yaitu: representatif, direktif, dan ekspresif.

Tindak tutur komisif dan tindak tutur deklarasi tidak ditemukan dalam penelitian ini.

Dengan adanya penggunaan tindak tutur representatif, direktif, dan ekspresif mampu membantu penyidik dalam mengurai, mengungkap, dan menindaklanjuti kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan oleh saksi korban. Selain itu, penggunaan tindak tutur tersebut mampu meringankan tugas penyidik yang mendapat jawaban dan keterangan berbelit-belit dari ter-sangka.

Dari hasil analisis diperoleh penggunaan tindak tutur yang lebih mendalam dari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu terutama dengan sumber data BAP hanya ditemukan penggunaan tindak tutur, yaitu: (1) tindak tutur refresentatif fungsi menyatakan, fungsi melaporkan, fungsi menuntut, dan fungsi mengakui; dan (2) tindak tutur direktif fungsi mendesak dan tindak tutur fungsi menyarankan. Pada penelitian ini ditemukan penggunaan tindak tutur, yaitu: (1) tindak tutur representatif fungsi menyatakan, fungsi melaporkan, fungsi menuntut, fungsi memberikan kesaksian, fungsi mengakui, dan fungsi menunjukkan; (2) tindak tutur direktif dengan fungsi mendesak, fungsi menyarankan, dan fungsi meminta; (3) tindak tutur ekspresif dengan fungsi menyalahkan. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu, terutama dengan penelitian yang mengambil sumber data dalam BAP. Hasil penelitian yang berbeda disebabkan oleh kasus atau perkara yang dianalisis dalam BAP yang berbeda pula.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis tindak tutur penyidik dalam interogasi kasus kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Banjarmasin disimpulkan bahwa ditemukan adanya penggunaan jenis tindak

tutur representatif, direktif, dan ekspresif. Dari hasil identifikasi tindak tutur representatif ditemukan tindak tutur representatif, dengan kategori, yaitu: (1) fungsi menyatakan, (2) fungsi melaporkan, (3) fungsi menuntut, (4) fungsi memberikan kesaksian, (5) fungsi mengakui, dan (6) fungsi menunjukkan. Dari hasil identifikasi tindak tutur direktif ditemukan tindak tutur direktif dengan kategori, yaitu: (1) fungsi mendesak, (2) fungsi menyarankan, dan (3) fungsi meminta. Dari hasil identifikasi tindak tutur ekspresif hanya ditemukan satu tindak tutur ekspresif dengan kategori, yaitu: fungsi menyalahkan.

Berdasarkan teori tindak tutur yang dikemukakan Searle dalam Gunarwan (2004) yang mencakup lima tindak tutur, yaitu: tindak tutur representatif, tindak tutur direktif, tindak tutur ekspresif, tindak tutur komisif, dan tindak tutur deklarasi hanya terdapat tiga penggunaan tindak tutur yang ditemukan dalam penelitian ini, yaitu tindak tutur representatif, direktif, dan ekspresif. Tindak tutur komisif dan tindak tutur deklarasi tidak ditemukan dalam penelitian ini.

Hasil penelitian ini memperlihatkan tindak tutur yang paling banyak dipergunakan penyidik, yaitu tindak tutur representatif dengan enam kategori fungsi dan penggunaan tindak tutur direktif dengan tiga kategori fungsi. Adapun tindak tutur yang paling sedikit ditemukan, yaitu penggunaan bentuk tindak tutur ekspresif dengan satu kategori fungsi.

Saran

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya, terutama kajian mengenai tindak tutur. Penelitian ini juga dapat menjadi acuan dalam bidang pragmatik kritis serta linguistik forensik sebagai upaya pengembangan keilmuan linguistik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifianti, Ika. 2016. "Tindak Tutur Penyidik dalam Interogasi pada Kasus Delik Aduan di Polda Jateng." Prosiding. *Analisis Bahasa dari Sudut Pandang Linguistik Forensik, SETALI 2016*, 239-244.
- Chaer, Abdul. 2010. *Kesantunan Berbahasa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Correa, Maite. 2013. "Forensics Linguistics: an Overview of the Intersection and Interaction of Language and Law." *Studies About Languages*. Vol. 23. P 5-13.
- Djajasudarma, T Fatimah. 2012. *Wacana dan Pragmatik*. Bandung: Refika Aditama.
- Djarmika. 2016. *Mengenai Pragmatik Yuk!?*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunarwan, Asim. 2004. "Dari Pragmatik ke Pengajaran Bahasa (Makalah Seminar Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah)." IKIP Singaraja.
- Hestiyana. 2008. "Tindak Tutur dalam Proses Penyidikan Pidana di Polsekta Banjarmasin Utara", dalam *Bunga Rampai Kebahasaan*, Nomor 2 hlm. 11-28. Banjarbaru: Balai Bahasa Banjarmasin.
- Kreidler, Charles W. 1998. *Introducing English Semantics*. New York: Routledge.
- Rani, dkk. 2000. *Prinsip-Prinsip Analisis Wacana*. Malang: Bayu Media.
- Rustono. 1999. *Pokok-Pokok Pragmatik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Silalahi, Ulber. 2006. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press.
- Soeparmono, R. 2016. *Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum Acara Pidana*. Yogyakarta: Mandar Maju.
- Sumarsono. 2004. *Filsafat Bahasa*. Jakarta: Grasindo.
- Suyono. 1990. *Pragmatik*. Malang: YA3 Malang.
- Tarigan, Henry Guntur. 1990. *Pengajaran Pragmatik*. Bandung: Angkasa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 *Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Bandung: Citra Umbara.
- Waluyo, Bambang. 2004. *Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wijana, I Dewa Putu. 1996. *Dasar-Dasar Pragmatik*. Yogyakarta: Andi.
- Yule, George. 1996. *Pragmatik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Yusri. 2016. *Ilmu Pragmatik dalam Perspektif Kesopanan Berbahasa*. Yogyakarta: Budi Utama.
- Zahrotunnisa, Reza. 2016. "Tindak Tutur dalam Sidang Perkara Pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Timur." Prosiding. *Analisis Bahasa dari Sudut Pandang Linguistik Forensik, SETALI 2016*, 536-539.